



Reaktualisasi Manifesto Intelektual Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui *Intermediate Training* untuk Penguatan *Civic Virtue* dalam Kebhinekaan

Abd. Firman Bunta^{1,*}, Ariyanto Nggili¹, Nurul Mawahda¹

¹Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
 Submit: 12 Juni 2026
 Revisi: 18 Juni 2026
 Diterima: 25 Juni 2026
 Diterbitkan: 30 Juni 2026

Kata Kunci

Manifesto Intelektual HMI, Intermediate Training, Civic Virtue, Kebhinekaan, Deliberasi Publik

Correspondence

E-mail: abdfirmanbunta@ung.ac.id*

A B S T R A K

Polarisasi sosial, disinformasi, dan penurunan etika ruang publik meningkatkan kerentanan kebhinekaan pada level relasi warga. Kondisi ini menuntut kader muda memiliki *civic virtue* yang operasional, terlatih, dan terukur dalam berorganisasi. Pengabdian ini bertujuan mereaktualisasi Manifesto Intelektual HMI melalui kegiatan *Intermediate Training* Tingkat Nasional HMI Cabang Pohuwato untuk memperkuat *civic virtue* dalam kebhinekaan. Metode menggunakan pelatihan terstruktur berbasis andragogi, *problem-based learning*, dan *deliberative learning*, disertai pendampingan luaran rencana aksi. Kegiatan berlangsung dengan diikuti 31 peserta, dievaluasi melalui *pre-test-post-test*, kuesioner disposisi, serta rubrik produk. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan dari 48% menjadi 87% dan kenaikan *civic virtue* agregat dari 45% menjadi 90%. Enam kelompok menghasilkan rencana aksi dengan rerata rubrik 86/100. Temuan menegaskan kaderisasi efektif ketika nilai diikat pada disiplin argumentasi, pengalaman deliberatif, dan desain aksi *policy brief* yang sensitif kebhinekaan. Implikasi menuntut mentoring pasca latihan kader, monitoring implementasi rencana aksi, dan pengembangan bank kasus kebhinekaan lokal.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Kehidupan kebangsaan Indonesia sedang berada pada fase yang menuntut kualitas kewargaan. Polarisasi sosial, menguatnya ujaran kebencian, disinformasi yang beredar lintas *platform*, dan penurunan etika ruang publik memengaruhi cara warga memaknai perbedaan. Situasi ini beririsan langsung dengan kebhinekaan sebagai kesadaran politik maupun fakta sosial. Kebhinekaan menuntut pengakuan identitas, kebiasaan hidup bersama yang beradab, kemampuan berdialog, dan komitmen terhadap kepentingan umum. Kajian studi menunjukkan, disinformasi dapat direspons melalui penguatan literasi kewargaan yang menekankan kemampuan menilai informasi, memahami konteks sosial, serta bertanggung jawab di ruang publik. Hal ini memberi landasan bahwa penguatan kewargaan perlu masuk ke arena pembentukan kader organisasi sebagai aktor sosial yang aktif (Pratiwi & Asyrotin, 2019).

Mahasiswa memegang posisi strategis dalam pembentukan nalar publik. Di lingkungan organisasi kader, proses pendidikan dan latihan kepemimpinan memiliki peluang yang signifikan dalam membangun kualitas warga negara yang reflektif dan kritis terhadap keadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu menyediakan perangkat konseptual untuk

mengukur capaian pembentukan warga negara melalui dimensi pengetahuan, keterampilan kewargaan, dan disposisi kewargaan. Dalam tradisi kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), *civic disposition* dipahami sebagai sikap dan karakter untuk menopang partisipasi demokratis, tanggung jawab sosial, dan komitmen pada nilai bersama. Topik *civic virtues* telah lama dibahas sebagai inti pembentukan karakter kewargaan di Indonesia serta mengalami dinamika historis dalam pendidikan moral dan kewarganegaraan (Somantri & Winataputra, 2017). Literatur ini relevan untuk membaca ulang praktik kaderisasi agar tidak berhenti pada reproduksi slogan, serta bergerak ke internalisasi nilai yang dapat dikenali melalui perilaku dan pilihan tindakan.

Gagasan “Manifesto Intelektual HMI” dapat diletakkan sebagai basis etis-intelektual untuk membentuk kader yang berpikir disiplin, peka pada ketidakadilan, dan bertanggung jawab memelihara kepentingan umum (Bunta, 2021b). Reaktualisasi manifesto berarti memindahkan ide dari slogan ke tindakan yang dapat diobservasi. Reaktualisasi juga berarti menyusun indikator perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kajian PKn memberi pijakan penting melalui konsep *civic disposition* dan *civic virtue* (Bunta, 2021a). *Civic disposition* merupakan seperangkat sikap, nilai, dan karakter yang menopang partisipasi demokratis serta tanggung jawab sosial. Penelitian tentang penguatan *civic disposition* melalui praktik pedagogik partisipatif menegaskan kebutuhan mengarahkan proses belajar pada partisipasi bermakna dan pembiasaan nilai, bukan pada hafalan norma (Rahmelia et al., 2026). Penekanan ini relevan untuk desain pengabdian pada kader HMI dalam pelatihan *Intermediate Training* yang menarget perubahan disposisi dalam kebhinekaan.

Civic virtue atau kebajikan warga negara dipahami sebagai keutamaan yang membentuk kualitas tindakan kewargaan. *Civic virtue* mencakup integritas, keadaban publik, penghormatan martabat manusia, empati sosial, dan komitmen pada kepentingan umum. Bukti empirik pada level praksis sosial dapat dibaca melalui kajian gerakan kerelawanan kebajikan yang menampilkan wajah humanistik Pancasila (Hanan & Mubarak, 2025). Kajian tersebut memperlihatkan kebajikan sosial dapat dirawat melalui partisipasi yang terorganisasi, nilai kemanusiaan, dan orientasi pada problem publik. Dalam ranah pengabdian, *civic virtue* dapat ditargetkan melalui capaian pelatihan, seperti latihan deliberasi, pembacaan kasus kebhinekaan, dan produksi rencana aksi yang mengandung etika publik.

Kebhinekaan dalam pemaknaan konteksnya menuntut perhatian khusus. Konflik identitas sering diproduksi oleh bias informasi, segregasi pergaulan, dan logika “kita-mereka” yang menyederhanakan realitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural memberi jalan untuk membangun toleransi melalui pengenalan keragaman, pengalaman dialog, dan pembiasaan penghargaan pada perbedaan. Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural berperan dalam penguatan sikap toleransi peserta didik melalui pembelajaran yang memberi pemahaman atas keberagaman dan membangun penerimaan terhadap yang berbeda (Noe et al., 2026). Pada tingkat mahasiswa-kader, prinsip yang sama dapat ditransformasikan menjadi pembelajaran orang dewasa berbasis studi kasus, forum deliberatif, dan refleksi nilai.

Kerja kebhinekaan juga membutuhkan strategi integrasi nilai yang jelas pada desain pembelajaran. Penelitian Dwintari (Dwintari & Murdiono, 2023) membahas strategi integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran kewarganegaraan pada konteks pendidikan inklusif. Implementasi nilai toleransi melalui program pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui strategi pembiasaan, interaksi lintas perbedaan, dan pengelolaan lingkungan belajar yang inklusif (Setiawan et al., 2024). Kedua temuan ini memberi justifikasi bahwa kebhinekaan dapat dijadikan target intervensi yang operasional, bukan sekadar nilai yang disebut pada kegiatan. Di sisi lain, tantangan kontemporer menuntut kemampuan berpikir kritis sebagai prasyarat kewargaan yang bertanggung jawab. Penguatan *civic virtue* pada kader akan mudah rapuh bila tidak ditopang oleh kecakapan analitis dan kebiasaan menguji klaim. Pembelajaran PKn dibangun dari tradisi teori kritis untuk mengembangkan

keterampilan berpikir kritis warga muda sebagai dasar menjadi warga yang transformatif. Keterampilan kritis ini relevan untuk merespons disinformasi, mengelola perbedaan, dan menjaga etika dialog (Rizwan, 2025).

HMI Cabang Pohuwato dipilih sebagai mitra pengabdian karena beberapa pertimbangan kontekstual yang mendasar. Pohuwato merupakan kabupaten di Provinsi Gorontalo yang secara demografis dihuni oleh beragam kelompok etnis dan pendatang dari berbagai daerah, menjadikannya ruang sosial yang rentan terhadap gesekan identitas bila tidak dikelola dengan kesadaran kebhinekaan yang matang (Pikoli, 2024; Yunus et al., 2023). Dinamika pilkada yang berulang, peredaran hoaks berbasis identitas di media sosial lokal, serta lemahnya forum dialog lintas kelompok di kalangan mahasiswa menjadi latar yang mendorong urgensi intervensi ini. HMI Cabang Pohuwato sebagai organisasi kader aktif di wilayah tersebut memiliki jaringan lintas kampus namun masih minim strategi implementasi kaderisasi yang secara eksplisit menargetkan penguatan *civic virtue* dalam konteks kebhinekaan. Kondisi ini menjadikan *Intermediate Training* (LK II) sebagai sarana strategis, karena peserta yang berasal dari berbagai cabang/kota membawa keragaman perspektif yang produktif sekaligus memerlukan kerangka nilai bersama yang dapat dioperasionalkan dalam tindakan nyata.

Artikel pengabdian ini memposisikan *Intermediate Training* (LK II) Nasional sebagai arena reaktualisasi Manifesto Intelektual HMI melalui desain pembelajaran berbasis PKn sebagai strategi penguatan *civic virtue* dalam kebhinekaan. Orientasi pengabdian diarahkan luaran yang terukur. Pertama ringkasan materi (modul) yang menghubungkan manifesto intelektual, kebhinekaan, dan *civic virtue*. Kedua instrumen evaluasi yang mendeskripsikan perubahan pengetahuan, sikap, dan kecenderungan tindakan peserta pada isu kebhinekaan. Ketiga aksi kader yang dinilai menggunakan rubrik etika publik, sensitivitas kebhinekaan, kelayakan program, serta basis data argumentasi. Melalui rancangan demikian, kaderisasi memperoleh basis akademik, mitra memperoleh produk yang dapat direplikasi, dan model pengabdian PKn yang relevan dengan problem kewargaan kontemporer.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian ini menggunakan rancangan pelatihan terstruktur yang dipadukan dengan pendampingan luaran, orientasi pada pembentukan *civic virtue* kader dalam dimensi kebhinekaan. Kegiatan ditempatkan sebagai intervensi pembelajaran orang dewasa berbasis andragogi, dengan prinsip pengalaman peserta sebagai sumber belajar, problem sosial materi, serta refleksi kritis sebagai penguat internalisasi nilai. Desain ini memanfaatkan *problem-based learning* untuk membawa peserta mengurai kasus kebhinekaan dari konteks nyata, kemudian mengolahnya menjadi keputusan dan rencana aksi. Landasan deliberatif digunakan untuk melatih praktik dialog publik, etika argumentasi, dan kemampuan menyusun kesepahaman dalam situasi perbedaan, selaras dengan kebutuhan integrasi nilai toleransi yang ditanamkan melalui strategi pembelajaran kewarganegaraan yang terencana (Dwintari & Murdiono, 2023).

Mitra kegiatan adalah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato. Peserta merupakan kader HMI yang mengikuti rangkaian kegiatan *Intermediate Training* (LK II) Tingkat Nasional, berasal dari berbagai cabang/kota di Indonesia. Kriteria inklusi mencakup status keikutsertaan resmi pada agenda kegiatan tersebut, kesediaan mengikuti *pre-test-post-test*, serta keterlibatan dalam kerja kelompok penyusunan luaran. Jumlah peserta, sebaran asal, dan profil ringkas peserta dicatat pada tahap administrasi kegiatan untuk kepentingan pelaporan dan analisis hasil.

Persiapan dilakukan melalui analisis kebutuhan menggunakan pra-survei singkat dan diskusi terarah bersama panitia serta perwakilan peserta untuk memetakan isu kebhinekaan yang dianggap paling mendesak. Tahap ini dilanjutkan dengan perancangan modul yang mengintegrasikan tema

Manifesto Intelektual HMI, kebhinekaan sebagai praksis kewargaan, dan indikator *civic virtue* yang operasional. Seluruh instrumen evaluasi disiapkan pada fase ini, mencakup instrumen *pre-test-post-test*, kuesioner disposisi berbasis skala Likert, serta rubrik penilaian luaran. Sebelum digunakan kepada 31 peserta, instrumen *pre-test-post-test* divalidasi secara sederhana melalui telaah pakar (*expert judgment*) dengan melibatkan dua orang dosen PKn untuk menilai kesesuaian butir soal dengan indikator pengetahuan kebhinekaan dan *civic virtue* yang ditargetkan. Masukan dari proses telaah digunakan untuk memperbaiki redaksi dan tingkat kesulitan butir agar instrumen layak dan representatif sebelum diimplementasikan.

Pelaksanaan inti dijalankan melalui lima sesi utama sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. Porsi simulasi dan kerja proyek dirancang untuk memperkuat keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran PKn yang diarahkan pada pembentukan warga negara transformatif (Mukmin & Sihalo, 2024). Dinamika kelas mendorong peserta menyampaikan pengalaman konkret, memeriksa asumsi yang digunakan, dan menata argumen dalam format yang dapat diuji secara publik.

Tabel 1. Sesi dan Alokasi Waktu Pelaksanaan *Intermediate Training* (LK II)

No	Sesi	Metode Dominan	Alokasi Waktu
1	Tanggung jawab intelektual publik kader	Ceramah & diskusi reflektif	90 menit
2	Kebhinekaan dan etika hidup bersama	Studi kasus & dialog kelompok	90 menit
3	<i>Civic virtue</i> dan keadaban publik	Ceramah & tanya jawab kritis	90 menit
4	Simulasi deliberasi publik (intoleransi & disinformasi)	Simulasi & debat terstruktur	120 menit
5	Penyusunan rencana aksi kebhinekaan	Kerja proyek kelompok	120 menit
6	Pretest & Posttest	Evaluasi tertulis	30 menit
Total			540 menit

Pendampingan evaluatif dilaksanakan sepanjang proses dan pascasesi melalui pengumpulan data *pre-test-post-test* pengetahuan, kuesioner disposisi, rubrik penilaian rencana aksi, serta dokumentasi proses. Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif melalui rerata skor, selisih pre-post, dan persentase peningkatan. Analisis kualitatif dilakukan melalui pembacaan tematik atas refleksi peserta, catatan fasilitator, dan umpan balik mitra. Triangulasi data digunakan untuk menjaga konsistensi temuan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan skor pengetahuan, pergeseran positif disposisi kebhinekaan, serta capaian mutu luaran minimal kategori layak. Penguatan disposisi kewargaan dipahami sebagai hasil dari praktik pedagogik partisipatif yang menghadirkan keterlibatan aktif peserta sepanjang proses belajar (Setyawati et al., 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 14-16 Desember 2025 kegiatan *Intermediate Training* (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Pohuwato. Kegiatan berjalan diikuti peserta sebanyak 31 kader yang mengikuti seluruh rangkaian evaluasi melalui lima sesi tahapan. Dinamika kelas menunjukkan pola belajar yang produktif ketika fasilitator/narasumber mendorong peserta menyampaikan pengalaman konkret, memeriksa asumsi yang digunakan, lalu menata argumen dalam format yang dapat diuji. Keterlibatan aktif ini meningkatkan partisipasi verbal, serta mendorong peserta untuk mengidentifikasi kontradiksi dalam keyakinan awal mereka, sebuah proses yang secara pedagogis dikenal sebagai disonansi kognitif produktif (Rahmah et al., 2025).

Sesi simulasi deliberasi publik menjadi titik penting karena peserta diminta menyatakan posisi, peserta juga diminta menampilkan etika berargumentasi, terbuka pada koreksi, dan sensitif pada dampak bahasa terhadap kelompok lain. Kemampuan ini dibentuk melalui latihan berulang dalam situasi yang mensimulasikan tegangan nilai nyata. Pada fase rencana aksi, peserta bergerak dari gagasan normatif menuju rancangan program yang memiliki sasaran, langkah kerja, indikator, dan risiko sosial. Transisi ini mencerminkan pergeseran epistemik dari mengetahui menuju kemampuan bertindak yang menjadi inti dari pendidikan kewargaan transformatif. Pola ini relevan dengan temuan bahwa penguatan disposisi kewargaan membutuhkan praktik pedagogik yang partisipatif

dan menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar penerima materi (Rahmelia et al., 2026).

Tabel 2. Peningkatan Pengetahuan dan Disposisi *Civic Virtue* Peserta *Intermediate Training* (LK-II)

No	Aspek Penilaian (Berdasarkan <i>Civic Virtue</i> dan Kebhinekaan)	Skor Rata-rata Pretest (%)	Skor Rata-rata Posttest (%)	Peningkatan (%)
1	Pengetahuan kebhinekaan sebagai praksis kewargaan	48	87	39
2	Disposisi toleransi	45	90	45
3	Keadaban dialog	45	90	45
4	Empati sosial	45	90	45
5	Integritas	45	90	45
6	Capaian mutu luaran rencana aksi (nilai rubrik /100)	—	86	—
Rata-rata		45,6	88,8	+43,8

3.1. Hasil Peningkatan Pengetahuan dan Sikap

Peningkatan pengetahuan dan sikap diukur berdasarkan hasil kuantitatif melalui *pre-test-post-test* yang memperlihatkan perubahan yang jelas pada pengetahuan peserta mengenai kebhinekaan dan *civic virtue*. Rerata skor *pre-test* 48% dan rerata skor *post-test* 87% (skala 0–100). Selisih peningkatan berada pada 39 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran berbasis masalah dan deliberasi publik efektif membangun pemahaman konseptual yang lebih rapi serta kemampuan menghubungkan konsep dengan konteks sosial.

Secara substantif, kenaikan pengetahuan paling tampak pada dua aspek. Pertama, peserta lebih mampu memaknai kebhinekaan sebagai kerja kewargaan yang menuntut pengelolaan relasi sosial dan etika ruang publik. Kedua, peserta lebih memahami *civic virtue* sebagai perangkat nilai yang melekat pada tindakan warga di ruang sosial maupun digital. Area yang masih perlu penguatan terlihat pada kemampuan mengubah nilai menjadi indikator program yang terukur, terutama saat peserta menyusun parameter evaluasi rencana aksi.

Perubahan juga tampak pada dimensi disposisi/kebajikan kewargaan. Empat indikator *civic virtue*: toleransi, keadaban dialog, empati sosial, integritas, yang diukur secara agregat. Skor sebelum intervensi berada pada 45% dan meningkat menjadi 90% setelah kegiatan (skala 0–100). Kenaikan 45 poin menunjukkan perubahan disposisi yang kuat secara kuantitatif.

Interpretasi atas perubahan ini perlu diletakkan pada konteks kegiatan. Sesi deliberasi publik dan latihan respons terhadap isu sensitif menciptakan situasi belajar yang menuntut kontrol diri, ketertiban argumen, dan kesediaan mendengar. Penelitian tentang strategi integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran kewarganegaraan menekankan bahwa toleransi tidak tumbuh dari deklarasi, toleransi tumbuh dari strategi pembelajaran yang menata pengalaman interaksi dan membangun kebiasaan menghormati perbedaan (Dwintari & Murdiono, 2023). Hasil skor disposisi meningkat sejalan dengan logika tersebut, karena peserta menjalani latihan nilai dalam interaksi nyata selama rangkaian kegiatan.



Gambar 1. Sesi akhir Pelatihan

3.2. Hasil Luaran Peserta

Luaran utama program pengabdian ini berupa dokumen rencana aksi kebhinekaan yang disusun melalui proses kerja kelompok terstruktur. Dari 31 peserta, kegiatan dibagi menjadi 6 kelompok kerja, masing-masing menghasilkan satu dokumen dengan format yang seragam mencakup: analisis masalah, tujuan, sasaran, strategi, langkah kerja, indikator keberhasilan, peta aktor pendukung, identifikasi risiko, dan rencana mitigasi. Keseragaman format ini disengaja sebagai instrumen pedagogik, agar peserta tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga berlatih berpikir sistemik dalam menghubungkan nilai dengan mekanisme tindakan.



Gambar 2. Sesi Diskusi Kelompok Peserta

Penilaian dokumen menggunakan rubrik berskala 0–100 dengan empat aspek, yaitu: ketajaman analisis masalah, sensitivitas kebhinekaan dan etika publik, kelayakan program, serta kualitas argumentasi dan indikator. Rerata skor rubrik seluruh kelompok berada pada angka 86/100 dengan kategori baik. Dua kelompok memperoleh kategori sangat baik karena berhasil merumuskan indikator yang operasional dan terukur, menyusun peta aktor yang realistis, serta menempatkan etika komunikasi publik sebagai bagian integral dari desain program.

Tema-tema luaran yang dihasilkan mencerminkan kepekaan peserta terhadap konteks lokal sekaligus relevansi isu kewargaan yang lebih luas, meliputi: forum dialog lintas kelompok di lingkungan kampus dan komunitas kader, literasi anti-hoaks berbasis kader sebagai agen edukasi publik, kampanye kebhinekaan beretika melalui konten digital yang terkurasi, forum warga yang mengaitkan kebhinekaan dengan isu layanan publik, serta panduan respons damai untuk eskalasi konflik sosial lokal. Keragaman tema ini menunjukkan bahwa peserta mampu membaca medan sosial di sekitar mereka dan menerjemahkan nilai-nilai kewargaan ke dalam intervensi yang kontekstual.

Dua luaran yang dinilai paling representatif adalah Forum Deliberasi Kebhinekaan Kader dan Kader Cek Fakta Kebhinekaan. Keduanya memenuhi kriteria kelayakan teknis dan menampilkan koherensi antara tujuan, langkah kerja, dan indikator yang dapat dievaluasi secara empiris. Kualitas dokumen ini memberi bukti bahwa proses pengabdian tidak berhenti pada peningkatan skor pengetahuan dan sikap. Kerja penyusunan rencana aksi memaksa peserta menata relasi antara nilai, risiko sosial, dan mekanisme implementasi secara eksplisit. Dengan kata lain, proses latihan berpikir yang melampaui kompetensi hafalan menuju kompetensi perancangan tindakan. Arah ini konsisten dengan ranah kajian PKn yang menekankan pengembangan berpikir kritis warga muda melalui pembelajaran yang mendorong otonomi, refleksi, dan kemampuan menyusun tindakan kewargaan yang bertanggung jawab (Rispati et al., 2025).

3.3. Reaktualisasi Manifesto Intelektual Sebagai Basis *Civic Virtue*

Reaktualisasi Manifesto Intelektual HMI dalam kegiatan ini terbaca dari perubahan orientasi belajar. Pada tahap awal, sebagian peserta memulai dari narasi nilai yang sudah disepakati, kemudian berhenti pada pernyataan normatif. Setelah sesi *problem-based learning* dan deliberasi, peserta bergerak ke model kerja intelektual yang lebih disiplin, mencakup: mendefinisikan masalah, memilah fakta dan opini, menguji asumsi, lalu menutup diskusi dengan rancangan program dan indikator.

Kerja intelektual dalam kaderisasi memperoleh bentuk etik yang konkret. Intelektualitas tidak direduksi menjadi kemampuan berpidato. Intelektualitas ditautkan pada kemampuan mengelola ruang publik secara beradab. Penekanan ini memperjelas fungsi *civic virtue*. *Civic virtue* bekerja sebagai pedoman tindakan yang mengarahkan cara kader menggunakan bahasa, menilai klaim, menyikapi perbedaan, dan merancang aksi kolektif. Temuan ini sejalan dengan studi tentang penguatan *civic disposition* yang menempatkan partisipasi dan pembiasaan sebagai mekanisme pembentukan karakter kewargaan (Darsana, 2025).

3.4. *Civic Virtue* dalam Kebhinekaan sebagai *Outcome* Kaderisasi

Civic virtue dalam kebhinekaan tampil dalam dua bentuk yang dapat diamati. Bentuk pertama terlihat pada proses deliberasi publik. Peserta mulai mempraktikkan respek, pengendalian emosi, dan kesediaan memberi ruang pada suara berbeda. Praktik ini tidak identik dengan relativisme. Praktik ini identik dengan disiplin etik dalam berargumentasi dan kemampuan membedakan kritik tindakan dari serangan identitas. Bentuk kedua terlihat pada luaran rencana aksi yang memasukkan aspek mitigasi konflik, kode etik komunikasi, dan peta aktor yang mengakui keberagaman kepentingan.

Kegiatan juga memperlihatkan tantangan yang berulang. Bias kelompok dan logika *echo chamber* muncul ketika peserta membawa potongan informasi digital sebagai “bukti” tanpa verifikasi. Tantangan ini penting karena disinformasi sering menjadi bahan pemicu konflik identitas. Studi partisipasi kewargaan menunjukkan disinformasi perlu dihadapi melalui penguatan literasi kewargaan yang menekankan kemampuan menilai informasi serta memahami dampak sosial dari penyebaran klaim (Nasoha et al., 2025). Kaderisasi pada level *Intermediate Training* dapat mengambil peran strategis pada aspek ini karena peserta berada pada posisi potensial sebagai opinion leader di komunitas masing-masing.

Dalam perpektif kebhinekaan, toleransi juga membutuhkan strategi pembelajaran yang membangun pengalaman hidup bersama. Kajian implementasi toleransi melalui program pendidikan multikultural menempatkan interaksi lintas perbedaan, pembiasaan, dan pengelolaan lingkungan belajar sebagai prasyarat tumbuhnya toleransi (Noe et al., 2026). Desain *Intermediate Training* yang memuat simulasi deliberasi, dan kerja kelompok lintas asal cabang memberi pengalaman kebhinekaan yang aktual.

3.5. Implikasi dan keberlanjutan

Implikasi program ini menempatkan *Intermediate Training* (LK-II) HMI sebagai titik awal pembentukan ekosistem kader yang menjalankan *civic virtue* dalam kebhinekaan. Program lanjutan yang realistis adalah “Sekolah Kewargaan Kader” pasca latihan ini dengan pertemuan bulanan, fokus pada studi kasus kebhinekaan lokal, latihan deliberasi, dan pendampingan implementasi rencana aksi. Bank kasus kebhinekaan dan panduan respons damai dapat disusun sebagai perangkat organisasi yang dipakai lintas cabang. Rekomendasi ini selaras dengan temuan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dapat menguatkan toleransi ketika strategi pembelajaran berjalan konsisten dan terstruktur (Kamlasi & Kusdarini, 2022).

4. Kesimpulan

Pengabdian melalui *Intermediate Training* (LK-II) Tingkat Nasional HMI Cabang Pohuwato menunjukkan hasil yang kuat pada aspek pengetahuan dan disposisi kewargaan. Rerata skor pengetahuan meningkat dari 48% pada *pre-test* menjadi 87% pada *post-test*. Selisih kenaikan 39 poin menggambarkan penguatan pemahaman peserta tentang kebhinekaan sebagai praksis kewargaan serta *civic virtue* sebagai pedoman tindakan publik. Skor agregat empat indikator *civic virtue* yang meliputi aspek toleransi, keadaban dialog, empati sosial, dan integritas, meningkat dari 45% menjadi 90%. Kenaikan ini terkait langsung dengan strategi pembelajaran yang menempatkan problem sosial sebagai titik masuk, melatih deliberasi publik, dan mengarahkan peserta menyusun luaran yang

dapat diimplementasikan. Luaran kegiatan berupa rencana aksi (*policy brief*) yang disusun oleh 6 kelompok dengan rerata nilai rubrik 86/100 (kategori baik). Luaran menampilkan tema dominan berupa forum dialog lintas kelompok, literasi anti-hoaks, kampanye kebhinekaan beretika, dan panduan respons damai. Reaktualisasi Manifesto Intelektual HMI sebagai hasil utama pengabdian ini terwujud pada pergeseran epistemik kader, dari mengetahui nilai menuju kemampuan mendiagnosis masalah, menyusun argumen berbasis data, dan merancang aksi yang sensitif terhadap kebhinekaan. Manifesto intelektual bergerak menjadi tata kerja berpikir dan berkomunikasi yang dapat diobservasi melalui produk dan proses yang dihasilkan peserta. Keterbatasan kegiatan terletak pada durasi intervensi yang mengikuti ritme agenda Pelatihan Intermediate Traingin, sampel yang terbatas pada satu pelaksanaan, dan belum adanya *follow-up* jangka panjang. Rekomendasi program meliputi mentoring pasca latihan selama 1-3 bulan, monitoring implementasi rencana aksi minimal satu siklus, serta pengembangan bank kasus kebhinekaan lokal untuk memperkaya pembelajaran berbasis masalah dan etika deliberasi kader.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pengurus HMI Cabang Pohuwato, serta seluruh panitia pelaksana *Intermediate Training* (LK-II) Tingkat Nasional yang telah memberikan dukungan penuh dan menciptakan ruang pembelajaran yang kondusif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh peserta pelatihan atas antusiasme, komitmen, dan keberanian intelektual dalam mengembangkan kompetensi kewargaan berbasis kebhinekaan dan *civic virtue*. Semoga luaran kegiatan ini, khususnya rencana aksi yang telah disusun, dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik organisasi dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi pijakan bagi pengembangan program serupa yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Bunta, A. F. (2021a). *Gerakan Civil Society Nurcholish Madjid di Indonesia*. Program Pascasarjana UNG.
- Bunta, A. F. (2021b). Gerakan Politik Kewarganegaraan Nurcholish Madjid di Indonesia. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3). 1451-1460. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.7.3.1451-1460.2021>
- Darsana, I. M. (2025). Model Citizen Journalism dalam Pembinaan Civic Disposition Mahasiswa: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 7108-7114.
- Dwintari, J. W., & Murdiono, M. (2023). The strategy of integrating tolerance values into civics learning in inclusive school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 214-222.
- Hanan, A. L., & Mubarak, G. (2025). The Relevance of Pancasila Values in the Formation of National Character to Realize a Civil Society in Indonesia. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 1(4), 159-166.
- Kamlasi, A. Y., & Kusdarini, E. (2022). Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam penguatan sikap toleransi siswa SMA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 738-747.
- Mukmin, B. A., & Sihaloho, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 170-196.
- Nasoha, A. M. M., Putri, S. A., & Safitri, M. D. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Civic Tech Skills untuk Partisipasi Politik Digital: Citizenship Education in Developing Civic Tech Skills for Digital Political Participation. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(5), 598-612.
- Noe, W., Abdullah, O. M., Tanszil, S. W., Pangalila, T., Bunta, A. F., & Sarina. (2026). Integrated multicultural-inclusive-peace-Islamic pedagogy: An empirical model of value internalization in an Indonesian Islamic school. 11, 1760579.
- Pikoli, W. (2024). Pola Adaptasi Spasial Penduduk Transmigrasi Di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pratiwi, A., & Asyarotin, E. N. K. (2019). Implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi disinformasi pada generasi millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 65-80.

- Rahmah, P. A., Arsyi, I. A., Ramadhani, M., & Muti'ah, R. (2025). Konsep Dasar Pedagogik: Kajian Teoretis Dan Implikasinya Dalam Praktik Pendidikan. *Culture Education and Technology Research (Cetera)*, 2(4), 511–522.
- Rahmelia, S., Apandie, C., & Nurizka, R. (2026). Penguatan Civic Disposition Melalui Praktik Pedagogik Partisipatif: Analisis Literatur dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 186–196.
- Rispawati, R., Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Alqadri, B. (2025). Development of civic skills through citizen projects in the citizenship education courses. *AMCA Journal of Education and Behavioral Change*, 5(2), 35–43.
- Rizwan, F. (2025). Are we teaching citizenship right?: A critical review of Pancasila education textbooks. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 294–307.
- Setiawan, A., Purnomo, P., Marzuki, M., Charismana, D. S., & Zaman, A. R. B. (2024). The implementation of tolerance values through multicultural education program. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 332–341.
- Setyawati, S., Muthali'in, A., & Prasetyo, W. H. (2021). Student Engagement in Civic Learning: A Study for Practice. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 6(2), 29–43.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Yunus, R., Manay, H., & Malae, A. K. (2023). *Pohuwato: Sejarah dan nilai kebangsaan*. Ideas Publishing.